



Anggota Dewan Diusulkan Kelola Anggaran Sendiri

JAKARTA - Hak yang dimiliki seorang anggota DPR bisa bertambah seiring dengan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Salah satunya terkait dengan hak anggota dewan untuk mengelola keuangan secara mandiri.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Perubahan UU MD3 Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya menyambungkan positif usul penguatan transparansi anggaran DPR yang disampaikan sejumlah kalangan pemerhati parlemen. Nah, menurut dia, kewenangan anggota dewan untuk mengelola anggaran itu bisa mendukung upaya transparansi.

"Prinsip pengelolaan keuangan itu seharusnya berbasis kegiatan individu, bukan berbasis komisi atau yang lain. Nanti setiap anggota dewan diaudit oleh BPK

(Badan Pemeriksa Keuangan)," kata Fahri di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, kemarin (17/2).

Dalam draf RUU MD3, ketentuan pada pasal 78 ditambah dua huruf, yakni huruf i dan j, dengan demikian, bunyi dalam pasal 78 itu, "Anggota DPR mempunyai hak: (f) mengusulkan dan memajukan program pembangunan daerah pemilihan; (g) mengelola dan memper-

tanggungjawabkan keuangan serta administrasinya secara mandiri.

Fahri mengungkapkan, sistem yang ada saat ini justru mengarah pada praktik maladministrasi. Sebab, tidak mau diatur secara detail pengelolaan anggaran anggota dewan.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, sumber-sumber keuangan anggota dewan harus transparan sejak awal.

"Jadi, harus diputus dari yang dimiliki sebelumnya. Misalnya, konglomerat. Kalau masuk DPR, ya jadi seperti yang lainnya. Dia tidak boleh memanfaatkan aset-asetnya," terang Fahri.

Kewenangan mengelola anggaran, sumber keuangan

Malah Fahri mengusulkan setiap warga negara yang menjadi anggota DPR tidak boleh memanfaatkan aset pribadi. Sumber keuangan yang digunakan semua anggota DPR sama, yakni dana yang dialokasikan APBN.

yang jelas, serta audit, menurut dia, bisa mengikis praktik korupsi yang selama ini banyak terjadi. "Sumbernya dibatasi, belanja juga dibatasi, baru korupsi bisa hilang. Jadi, uang masuk diatur, uang keluar diatur," kata politikus PKS itu. *(fal/cb/rom)*